

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
MENURUT PENGELUARAN
PROVINSI MALUKU UTARA 2013**



**Produk Domestik Regional Bruto
Menurut Pengeluaran
Provinsi Maluku Utara
Tahun 2013**

<http://maluku.go.id>

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
MENURUT PENGELUARAN
PROVINSI MALUKU UTARA
2013**

No. Publikasi : 82550.1402
Katalog BPS : 9302002.82

Ukuran Buku : 16 cm x 21 cm
Jumlah Halaman : xi + 49 halaman

Naskah : Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Penyunting : Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kulit : Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan Oleh : BPS Provinsi Maluku Utara

Dicetak Oleh : CV. Ardhani Ternate

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

KATA PENGANTAR

Publikasi “Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara 2013” merupakan seri publikasi rutin yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara sejak tahun 2013. Publikasi ini memuat data PDRB dari sisi penggunaan tahun 2011-2013 atas dasar harga berlaku dan harga konstan 2000 dan disajikan dalam bentuk tabel-tabel disertai ulasan perkembangan ekonomi Provinsi Maluku Utara di tahun 2013.

Perlu diketahui bahwa angka PDRB tahun 2013 yang disajikan dalam publikasi ini merupakan angka sangat sementara. Sedangkan angka tahun sebelumnya telah diadakan koreksi serta perbaikan, sehingga angka PDRB tahun 2012 menjadi angka sementara dan angka PDRB tahun 2011 menjadi angka tetap. Diharapkan pemakai data memperhatikan perbaikan yang ada dan disarankan menggunakan angka terakhir.

Meskipun publikasi ini telah dipersiapkan sebaik-baiknya, disadari masih ada kekurangan dan kesalahan. Untuk itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan publikasi ini di waktu mendatang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan semua pihak yang telah membantu terbitnya publikasi ini.

Ternate, April 2014
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Maluku Utara,

M. Habibullah, S.Si, M.Si
NIP. 19670619 198901 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Tujuan Penulisan.....	3
1.3 Sistematika Penulisan	4
BAB II. KONSEP DEFINISI DAN METODE PENGHITUNGAN	
2.1 Konsep Definisi	6
2.2 Metode Penghitungan	8
2.2.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	8
2.2.2 Pengeluaran Lembaga Swasta Nirlaba.....	10

2.2.3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	11
2.2.4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	13
2.2.5	Perubahan Inventori	14
2.2.6	Transaksi Eksternal (Perdagangan Antar Wilayah).....	15

BAB III. PERKEMBANGAN PDRB

3.1	Perkembangan PDRB Provinsi Maluku Utara.....	18
3.2	Pertumbuhan Ekonomi.....	20
3.3	Struktur PDRB Provinsi Maluku Utara	21
3.4	PDRB Per Kapita	23

BAB IV. KOMPONEN PDRB PENGELUARAN

4.1	Konsumsi Rumah Tangga.....	26
4.2	Konsumsi Pemerintah	29
4.3	Pembentukan Modal Tetap Bruto atau Investasi Fisik ..	32
4.4	Ekspor dan Impor Barang dan Jasa.....	34
4.4.1	Ekspor	35
4.4.2	Impor.....	37

L A M P I R A N	40
-----------------------	----

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011-2013 (miliar rupiah)	18
Tabel 3.2 PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2011-2013 (miliar rupiah).....	20
Tabel 3.3 Struktur PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2011-2013 (persen)	22
Tabel 3.4 Perbandingan PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK Provinsi Maluku Utara, 2011-2013 (juta rupiah).....	25
Tabel 4.1 Perkembangan Konsumsi Rumah Tangga Menurut Komponen Pembentuknya Tahun 2011-2013 (miliar rupiah)	27
Tabel 4.2 Perkembangan Konsumsi Pemerintah Per Kapita di Provinsi Maluku Utara, 2011-2013.....	31

Tabel 4.3 Perkembangan Pembentukan Modal Bruto (PMB) Menurut Komponen di Provinsi Maluku Utara, 2011-2013 (miliar rupiah)	33
Tabel 4.4 Keseimbangan Neraca Perdagangan Luar Wilayah Provinsi Maluku Utara, 2011-2013 (miliar rupiah)	35
Tabel 4.4.1 Perkembangan Ekspor Provinsi Maluku Utara, 2011-2013	36
Tabel 4.4.2 Perkembangan Impor Provinsi Maluku Utara, 2011-2013	38

<http://malut.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Maluku Utara, 2011-2013 (persen).....	21
Gambar 4.1 Perbandingan Pertumbuhan Komponen Konsumsi Rumah Tangga dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Maluku Utara (persen), 2011-2013.....	28
Gambar 4.2 Perbandingan Perkembangan, Pertumbuhan, dan <i>Share</i> Komponen Konsumsi Pemerintah di Provinsi Maluku Utara, 2011-2013 (persen)	30
Gambar 4.3 Perbandingan Pertumbuhan PMTB dan PDRB Provinsi Maluku Utara, 2012-2013 (persen)	34

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Maluku Utara Tahun 2011-2013 (miliar rupiah).....	41
Lampiran 2. PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2000 Provinsi Maluku Utara Tahun 2011-2013 (miliar rupiah).....	42
Lampiran 3. Distribusi Persentase PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Maluku Utara Tahun 2011-2013 (persen).....	43
Lampiran 4. Distribusi Persentase PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2000 Provinsi Maluku Utara Tahun 2011-2013 (persen).....	44
Lampiran 5. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Maluku Utara Tahun 2011-2013 (persen).....	45

Lampiran 6.	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2000 Provinsi Maluku Utara Tahun 2011-2013 (persen).....	46
Lampiran 7.	Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2011-2013 (persen).....	47
Lampiran 8.	Indeks Berantai PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Maluku Utara Tahun 2011-2013 (persen).....	48
Lampiran 9.	Indeks Berantai PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2000 Provinsi Maluku Utara Tahun 2011-2013 (persen).....	49

PENJELASAN SIMBOL

Simbol yang digunakan dalam publikasi ini adalah sebagai berikut :

- *) : Angka sementara
- **) : Angka sangat sementara

<http://malut.bps.go.id>

Bab 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu biasanya satu tahun. PDRB dapat dihitung melalui pengukuran arus sirkular (*circular flow*) yang pengukurannya dapat dibedakan menjadi tiga cara yaitu metode total keluaran (*the total output method*), metode pengeluaran atas keluaran (*the spending on output method*), dan metode pendapatan dari produksi (*the income from production method*). Pendekatan penghitungan PDRB dengan metode yang pertama dikenal dengan sebutan pendekatan produksi, yang kedua dikenal sebagai pendekatan pengeluaran, dan yang terakhir dikenal dengan pendekatan pendapatan.

Pendekatan “produksi” akan menurunkan nilai tambah, pendekatan “pendapatan” akan menjelaskan tentang struktur/komposisi pendapatan, sementara pendekatan “penggunaan/pengeluaran” menjelaskan tentang penggunaan akhir dari pendapatan masyarakat.

Pertemuan antara ketiga dimensi pendekatan tersebut dikenal sebagai titik keseimbangan umum antara sisi penyediaan dan permintaan di tingkat makro/semi makro (*general equilibrium*). Ketidakseimbangan yang terjadi antara dua titik tersebut diartikan sebagai surplus atau defisitnya suatu daerah. PDRB sisi sektoral (penyediaan) pada intinya menjelaskan tentang besaran nilai tambah dalam pengertian sederhana diartikan sebagai pendapatan masyarakat yang timbul di suatu wilayah akibat keterlibatannya dalam proses produksi. Nilai tambah disini merupakan pendekatan pengukuran terhadap sektor yang membayarkan (produsen) yang diturunkan dari berbagai aktivitas ekonomi yang berada di suatu wilayah. Dari sisi ini dapat diketahui data agregat turunannya seperti struktur ekonomi (harga berlaku), pertumbuhan ekonomi (harga konstan) dan indeks implisit PDRB

(harga berlaku dan konstan). Selain itu juga data PDRB perkapita, sebagai indikator yang menjelaskan tentang kemampuan orang perorang dalam menikmati hasil pembangunan ekonomi (disebut sebagai ukuran “produktivitas”).

Dilihat dari sisi permintaan atau penggunaan akhir, data PDRB ini menurunkan agregat-agregat makro mengenai struktur/komposisi permintaan atau penggunaan akhir masing-masing komponen, pertumbuhan “riil”, serta indeks harga implisit. Dimana komponen penggunaan akhir ini meliputi: konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPR), konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (PMTB), perubahan inventori, serta permintaan luar negeri (ekspor dan impor). Melalui pendekatan ini akan dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatannya, apakah hanya untuk tujuan konsumsi akhir atau juga investasi. Selain itu juga dapat diketahui besar ketergantungan ekonomi domestik (wilayah) terhadap wilayah lain dalam bentuk perdagangan barang dan jasa (transaksi eksternal).

Dengan demikian apabila pengukuran PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan, maka secara langsung akan menunjukkan adanya keterkaitan antara “**nilai tambah**” yang diturunkan oleh berbagai sektor ekonomi produksi dengan “**pendapatan (proksi)**” yang diterima oleh masyarakat, serta bagaimana masyarakat menggunakan pendapatannya tersebut untuk membiayai seluruh “**konsumsinya**”.

1.2. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan publikasi PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara 2013 adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui besaran PDRB menurut pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan.
2. Mengetahui laju pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan masing-masing komponen, dan sumber pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2013.
3. Memberikan gambaran struktur konsumsi atau pengeluaran akhir berbagai produk dan jasa di Provinsi Maluku Utara.

1.3. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan publikasi ini disusun sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang, tujuan penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II. Konsep Definisi dan Metode Penghitungan, membahas tentang konsep definisi, metodologi, dan sumber data yang digunakan.

Bab III. Perkembangan PDRB, membahas tentang gambaran umum perekonomian Provinsi Maluku Utara, pertumbuhan ekonomi, dan struktur PDRB ditinjau dari sisi pengeluaran tahun 2013.

Bab IV. Komponen PDRB Pengeluaran, menjelaskan tentang pertumbuhan tiap-tiap komponen pengeluaran selama kurun waktu 2011-2013.

Bab 2

KONSEP DEFINISI DAN METODE PENGHITUNGAN

Gambaran secara menyeluruh tentang kondisi perekonomian suatu daerah dapat dilihat melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sebagai salah satu indikator makro ekonomi, penghitungan atau estimasi PDRB harus selalu mengikuti perubahan/perkembangan tatanan perekonomian yang terjadi, agar hasil dari penghitungan PDRB menjadi sangat realistis dan dapat dipercaya/digunakan oleh berbagai strata konsumen data untuk berbagai keperluan/kepentingan.

2.1 Konsep Definisi

Angka PDRB menurut pengeluaran dapat memperlihatkan komposisi penggunaan barang dan jasa, baik yang dihasilkan di wilayah itu sendiri maupun yang berasal dari impor atau dari wilayah lain.

Secara garis besar, barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi, apabila dilihat dari segi pengeluarannya, dapat digolongkan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam proses produksi (konsumsi antara), dan untuk memenuhi konsumsi masyarakat (konsumsi akhir).

Barang dan jasa yang termasuk dalam konsumsi antara akan habis dalam satu kali proses produksi, sedangkan barang dan jasa yang termasuk dalam konsumsi akhir meliputi pengeluaran konsumsi rumahtangga, pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan stok, ekspor dan impor.

Barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi permintaan akhir tidak saja berasal dari produk domestik tetapi juga berasal dari impor, baik dari luar negeri maupun dari wilayah lain. Secara ringkas keadaan tersebut dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut,

$$Y + M = C + I_f + I_s + E \quad \dots (1)$$

dimana,

Y : Produk Domestik Regional Bruto

M : Impor

C : Konsumsi rumah tangga, lembaga swasta nirlaba, dan pemerintah

I_f : Pembentukan modal tetap bruto

I_s : Perubahan stok

E : Ekspor

Dalam hal ini yang dihitung adalah produk domestik (pendapatan yang ditimbulkan di daerah tersebut), maka persamaan di atas dapat diturunkan menjadi :

$$Y = C + I_f + I_s + E - M \quad \dots (2)$$

atau,

$$Y = C + (I_f + I_s) + (E - M) \quad \dots (3)$$

atau,

$$Y = C + I + (E - M) \quad \dots (4)$$

dimana,

I : Investasi

E-M : Ekspor neto

Oleh karena itu, dalam penyajian PDRB menurut penggunaan harus dihitung komponen-komponen penggunaan atau permintaan akhir

2.2 Metode Penghitungan

Pada umumnya, cara pengukuran PDRB menurut pengeluaran dilakukan dengan metode arus komoditi (*commodity flow method*), yaitu dengan cara menelusuri alokasi barang dan jasa yang tersedia (*supply*) yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di suatu wilayah, pada satu kurun waktu tertentu. Barang dan jasa tersebut bisa berasal dari produk domestik maupun impor (baik yang berasal dari wilayah lain maupun negara lain).

2.2.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Perkiraan besaran pengeluaran konsumsi rumah tangga dapat dilakukan dengan beberapa metode estimasi sebagai berikut:

1. Metode langsung
2. Metode tidak langsung
 - i. Pendekatan dari segi arus barang;
 - ii. Pendekatan dari segi penilaian harga eceran;
 - iii. Pendekatan dari segi penjualan secara eceran
3. Metode campuran

Pada prakteknya, dalam memperkirakan besaran konsumsi rumah tangga tidak dapat menggunakan satu metode saja. Disamping karena adanya keterbatasan sumber data, masing-masing metode kurang mampu mencakup berbagai pengeluaran rumah tangga sesuai klasifikasi barang dan jasa yang dikonsumsi. Untuk mengatasi hal tersebut dapat digunakan metode campuran, yaitu gabungan antara metode langsung dengan metode penilaian harga eceran. Sumber data yang digunakan untuk metode ini adalah hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional

(Susenas) modul konsumsi, rata-rata harga eceran, IHK daerah perkotaan dan perdesaan, dan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Penghitungan konsumsi rumah tangga selama ini berdasarkan data Susenas. Namun, data konsumsi Susenas cenderung *under estimate* untuk konsumsi rumah tangga perkotaan, terutama untuk barang-barang non makanan dan makanan jadi. Untuk itu perlu dilakukan *mark up* untuk data konsumsi rumah tangga di perkotaan. Cara yang dilakukan adalah dengan membandingkan hasil Survei Biaya Hidup (SBH) dengan hasil Susenas di kota yang sama, komoditi per komoditi. Sehingga diperoleh data konsumsi rumah tangga pada tahun t dimana data Susenas kota yang sudah di-*mark up* ditambah dengan Susenas desa.

$$C_{t=} (\text{Susenas kota } t \times \text{Mark up}) + \text{Susenas desa } t$$

Dimana :

C_t : Konsumsi rumah tangga tahun t

Mark Up : Selisih SBH dan Susenas di kota yang sama (penghitungan akan lebih baik jika dilakukan berdasarkan komoditi atau kelompok komoditi)

Penghitungan di atas menunjukkan konsumsi rumah tangga atas dasar harga berlaku. Untuk konsumsi rumah tangga harga konstan, konsumsi rumah tangga harga berlaku dikelompokkan terlebih dahulu menjadi 7 kelompok IHK. Selanjutnya, lakukan penjumlahan terhadap kelompok komoditi hasil *deflate* antara konsumsi rumah tangga harga berlaku dibagi dengan IHK menurut kelompok komoditi.

2.2.2 Pengeluaran Lembaga Swasta Nirlaba

Nilai pengeluaran konsumsi LNPRT sama dengan output atau biaya produksi yang dikeluarkan lembaga dalam rangka melakukan kegiatan layanan kepada masyarakat, anggota organisasi, atau kelompok masyarakat tertentu. Biaya produksi LNPRT sama dengan nilai konsumsi (antara) ditambah biaya primer (upah dan gaji pegawai, penyusutan barang modal, dan pajak tak langsung). Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan lembaga atas penggunaan barang dan jasa (antara) dan faktor produksi, ditambah nilai barang dan jasa yang berasal dari produksi sendiri atau pemberian pihak lain (transfer). Jika lembaga menggunakan input yang diperoleh secara cuma-cuma dari pihak lain, maka nilainya diperkirakan sesuai dengan harga pasar yang berlaku.

Perkiraan nilai pengeluaran konsumsi LNPRT dapat dilakukan dengan menggunakan metode langsung maupun metode tidak langsung.

a. Metode Langsung

Metode penghitungan yang didasarkan pada data hasil survei atau sensus. Nilai tersebut merupakan hasil estimasi rata-rata biaya layanan dari sampel sebagai berikut :

$$\bar{x}_i = \frac{\sum_{j=1}^{n_i} x_{ij}}{n_i}$$

Dimana :

x_{ij} : nilai biaya layanan untuk lembaga ke j dari bentuk LNPRT kode-i

\bar{x}_i : rata-rata biaya layanan LNPRT kode-i

n_i : banyaknya sampel LNPRT kode-i

Jika rata-rata biaya layanan LNPRT per bentuk lembaga \bar{x}_i dikalikan dengan populasi bentuk LNPRT kode I (N_i), maka akan diperoleh estimasi nilai pengeluaran konsumsi bentuk LNPRT kode i (x_i) atau $x_i = \bar{x}_i \cdot N_i$

b. Metode tidak langsung

Metode ini memperkenalkan cara menghitung estimasi pendapatan LNPRT (sebagai sumber pembiayaan) berdasarkan pengeluaran dari lembaga lain yang membiayai kegiatan LNPRT. Dengan asumsi bahwa pada umumnya LNPRT tidak bertujuan mencari untung, maka total penerimaan sama dengan total pengeluaran.

2.2.3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Sumber data yang digunakan dalam penghitungan besarnya konsumsi pemerintah adalah; data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pemerintah pusat, data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari masing-masing tingkat pemerintahan (provinsi, kabupaten/kota, dan desa) serta jumlah pegawai negeri pusat dan daerah.

Untuk menghitung pengeluaran konsumsi pemerintah, terlebih dahulu harus disusun neraca produksi pemerintah, dimana konsumsi pemerintah merupakan salah satu komponennya. Neraca produksi pemerintah terdiri dari pengeluaran untuk biaya antara (belanja barang dan bantuan sosial), balas jasa pegawai/belanja pegawai dan penyusutan di sisi kiri, serta konsumsi pemerintah (output non pasar) dan penjualan dari barang dan jasa (output pasar) di sisi kanan.

Untuk penghitungan pengeluaran konsumsi pemerintah berdasarkan harga konstan diperoleh dari hasil penghitungan komponen-komponen neraca produksi adh konstan. Biaya antara (belanja barang dan bantuan sosial) adh konstan diperoleh dengan men-*deflate* biaya antara atas dasar harga berlaku dengan Indeks

Perdagangan Harga Besar (IHPB) tanpa sektor ekspor. Sedangkan nilai tambah bruto adh konstan didapat dengan mengekstrapolasi nilai tambah bruto pada tahun dasar dengan indeks jumlah pegawai negeri sipil. Untuk penjualan barang dan jasa atas dasar harga konstan didapat dengan mempergunakan persentase penjualan barang dan jasa terhadap output pada harga berlaku.

Neraca Produksi Pemerintah

Input			Output		
1.	Biaya Antara (belanja barang dan bantuan sosial)	(A)	3.	Output Pengeluaran konsumsi pemerintah (Output non pasar)	(C)
2.	Nilai Tambah Bruto	(B)=(B1)+(B2)	3.1		(D)=(C)-(E)
2.1	Penyusutan	(B1)	3.2	Penjualan barang dan jasa	(E)
2.2	Belanja Pegawai	(B2)			
Total Input		(A)+(B)	Total Output		(C)

Indeks yang digunakan untuk menghitung indeks jumlah pegawai negeri sipil, adalah indeks Laspeyres yang dimodifikasi seperti berikut:

$$I_j = \frac{\sum_{j=1}^4 \frac{Q_{n,j}}{Q_{0,j}} \times Q_{0,j} P_{0,j}}{\sum_{j=1}^4 Q_{0,j} P_{0,j}} = \frac{\sum_{j=1}^4 Q_{0,j} P_{0,j}}{\sum_{j=1}^4 Q_{0,j} P_{0,j}}$$

Dimana :

I_j : Indeks jumlah pegawai pada tahun n , $n=2013$

$P_{0,j}$: Bagian gaji golongan j terhadap total gaji pegawai pada tahun dasar, tahun dasar 2000

$Q_{0,j}$: Jumlah pegawai menurut golongan pada tahun dasar

$Q_{n,j}$: Jumlah pegawai golongan j pada tahun ke n

j : Golongan I, II, III, IV

2.2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan modal tetap bruto yang terdiri dari berbagai jenis dan wujud barang modal (kapital) ini dapat dibedakan menjadi tiga golongan atau klasifikasi pokok yaitu :

1) Menurut jenis barang

2) Menurut sektor penguasa/pemilik (*holder*)

Barang modal yang dimiliki atau dikuasai oleh sektor-sektor ekonomi produksi (produsen) yang digunakan dalam proses produksinya.

3) Menurut institusi

Barang modal yang dimiliki atau dikuasai oleh pelaku-pelaku ekonomi (institusi) untuk digunakan dalam proses produksinya baik secara langsung maupun tidak langsung

Estimasi nilai PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung. Pemilihan metode ini disesuaikan dengan tingkat ketersediaan data. Secara konseptual metode langsung merupakan cara yang relatif paling dapat dilakukan. Pada metode ini, penghitungan dilakukan dengan menjumlahkan

seluruh nilai PMTB yang terjadi pada setiap sektor kegiatan ekonomi (lapangan usaha).

Di berbagai negara, metode yang digunakan dalam menghitung PMTB masih banyak menggunakan metode tidak langsung karena alasan kemudahan secara teknis. Pada metode tidak langsung ini, estimasi nilai PMTB dalam bentuk bangunan dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu terhadap output sektor konstruksi baik untuk penghitungan atas dasar harga berlaku maupun harga konstan. Dalam penghitungan PDB digunakan rasio sebesar 0,9215. Estimasi nilai PMTB yang berupa mesin, angkutan, dan barang modal lainnya dibedakan menurut barang modal yang berasal dari produksi dalam negeri dan yang berasal dari impor. Penghitungan PMTB berupa mesin, angkutan, dan barang modal lainnya yang berasal dari dalam negeri diperoleh dengan dua cara, yaitu yang pertama mengalokasikan output mesin, angkutan dan barang modal lainnya yang menjadi bagian dari pembentukan modal, ditambah biaya angkut dan margin perdagangan. Dari penghitungan tersebut akan diperoleh estimasi PMTB atas dasar harga berlaku. Sementara untuk penghitungan atas dasar harga konstan diperoleh dengan cara *men-deflate* PMTB atas dasar harga berlaku dengan IHPB masing-masing jenis barang yang sesuai.

2.2.5 Perubahan Inventori

Nilai perubahan inventori dalam komponen PDRB menurut pengeluaran masih merupakan residual atau selisih atau perbedaan antara total PDRB sektoral dengan total PDRB menurut pengeluaran. Dengan demikian maka pada komponen ini selain mencakup perubahan stok atau inventori termasuk juga diskrepansi statistik.

Dalam pengukurannya perubahan inventori merupakan satu-satunya komponen yang bisa mempunyai 2 (dua) tanda yaitu positif dan negatif. Positif dalam arti terjadi penambahan barang inventori sedangkan negatif apabila terjadi pengurangan barang inventori dari persediaan (stok) yang ada.

2.2.6 Transaksi Eksternal (Perdagangan Antar Wilayah)

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan ekspor dan impor bersumber dari hasil pengolahan Simoppel (Sistem Informasi Operasional Pelabuhan), pelabuhan udara (bandara), data ekspor impor barang dan jasa dari Disperindag. Selain itu, jembatan timbang juga bisa menjadi alternatif sumber data lainnya apabila kegiatan perdagangan antar daerah yang melalui lintas daratan sulit diperoleh.

Metode estimasi yang dianjurkan terdiri dari metode langsung maupun tidak langsung.

a) Metode Langsung

Metode ini dapat dilakukan dengan melakukan survei khusus arus barang dan jasa yang keluar maupun yang masuk ke dalam daerah tersebut.

b) Metode Tidak Langsung

Nilai produk barang dan jasa yang diperdagangkan antar daerah yang diperoleh dari berbagai sumber dibuat dalam satuan rupiah yang merupakan estimasi atas dasar harga berlaku. Untuk menjadikannya ke dalam harga konstan, nilai barang dan jasa atas dasar harga berlaku tersebut harus di-*deflate* dengan menggunakan indeks harga perdagangan besar barang dan jasa yang relevan sebagai deflatornya.

<http://malut.bps.go.id>

Bab 3

PERKEMBANGAN PDRB

<http://mail.bps.go.id>

3.1 Perkembangan PDRB Provinsi Maluku Utara

Secara umum, tingkat kesejahteraan suatu daerah pada suatu waktu dapat dilihat dari kondisi perekonomiannya. Dalam artian bahwa semakin baik tatanan perekonomian suatu daerah, maka kesempatan untuk meningkatkan derajat kesejahteraan semakin terbuka dengan lebar. Meskipun dalam kondisi ini masih perlu mendapat kajian yang lebih mendalam lagi. Selama ini struktur perekonomian suatu daerah dapat diamati dari angka PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Tabel 3.1
PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2011-2013 (miliar rupiah)

Komponen	2011	2012 *)	2013 **)
(1)	(2)	(3)	(4)
Konsumsi Rumah Tangga	4 140,04	4 770,70	5 308,51
Konsumsi Pemerintah	1 922,29	2 149,27	2 428,33
PMTB	592,83	697,33	788,00
Perubahan Stok dan	-776,21	-733,50	-703,78
Diskrepansi Statistik			
Ekspor	1 627,66	1 752,67	1 895,61
Impor	1 467,94	1 718,03	1 991,27
PDRB	6 038,66	6 918,43	7 725,42

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Pada kurun waktu 2011-2013, capaian kontribusi ekonomi Provinsi Maluku Utara terhadap nasional, masih dibawah satu persen yaitu sekitar 0,1

persen terhadap PDB nasional. Hal ini dikarenakan masih belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam yang ada di Provinsi Maluku Utara sebagai akibat dari minimnya investasi yang ditanamkan. Dengan demikian, capaian PDRB atas dasar harga berlaku selama kurun waktu 2011-2013 masih berkisar antara 6 sampai 7 triliun rupiah.

Sementara PDRB Provinsi Maluku Utara atas dasar harga konstan 2000 juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, walaupun capaian tersebut tidak memberikan *share* yang cukup berarti pada perekonomian nasional. Pada tahun 2012 PDRB Provinsi Maluku Utara atas dasar harga berlaku mencapai 3,45 triliun rupiah, sementara PDB nasional mencapai 2.618,9 triliun rupiah. Sedangkan pada tahun 2013, PDRB Provinsi Maluku Utara mengalami peningkatan, namun nilainya masih cukup kecil sekitar 3,66 triliun rupiah. Dimana PDB nasional mencapai 2.770,3 triliun rupiah. Pada Tabel 3.1 dan Tabel 3.2 disajikan secara lengkap angka PDRB Provinsi Maluku Utara dirinci menurut komponen.

Tabel 3.2
PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2000
Tahun 2011-2013 (miliar rupiah)

Komponen	2011	2012 *)	2013 **)
(1)	(2)	(3)	(4)
Konsumsi Rumah Tangga	2 639,50	2 863,97	3 075,83
Konsumsi Pemerintah	950,83	1 033,38	1 109,10
PMTB	248,17	279,81	300,84
Perubahan Stok dan	-660,48	-733,28	-780,17
Diskrepani Statistik			
Ekspor	867,16	892,31	920,60
Impor	815,13	890,69	969,91
PDRB	3 230,05	3 445,50	3 656,30

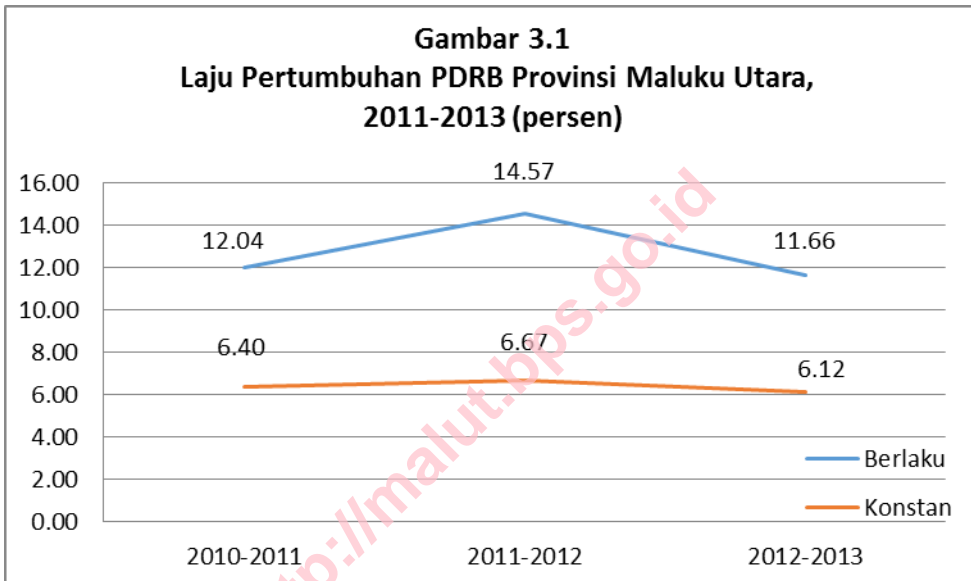
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

3.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah diukur dari PDRB atas dasar harga konstan (ADHK). Hal ini dimaksudkan karena pada PDRB adhk, faktor inflasi sudah dihilangkan sehingga angka yang tercipta merupakan peningkatan produksi secara riil. Penggunaan tahun dasar pada PDRB adhk adalah tahun 2000.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara selama kurun waktu 2011-2013 memperlihatkan capaian yang cukup tinggi. tahun 2012 misalnya, perekonomian Provinsi Maluku Utara tumbuh sebesar 6,67 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi nasional secara total hanya mencapai 6,26 persen. Perekonomian Provinsi Maluku Utara pada tahun 2013 mengalami pertumbuhan

sebesar 6,12 persen, tercatat lebih rendah dari tahun 2011 dan 2012, masing-masing sebesar 6,40 persen dan 6,67 persen.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

3.3 Struktur PDRB Provinsi Maluku Utara

Salah satu kegunaan PDRB karena angka PDRB disusun dari beberapa komponen, sehingga dapat diketahui komponen apa yang menjadi penyusun utama dalam perekonomian suatu daerah. Selain itu, struktur perekonomian juga dapat menjadi acuan untuk mengambil suatu kebijakan strategis bagaimana memajukan komponen penyusun PDRB yang memiliki *share* yang masih kecil.

Secara umum, struktur perekonomian Provinsi Maluku Utara dari sisi pengeluaran masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga. Selama kurun waktu 2011-2013, konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari separuh total

perekonomian Provinsi Maluku Utara. Hal ini mengindikasikan bahwa Provinsi Maluku Utara merupakan daerah yang baru berkembang, berbeda dengan daerah yang sudah lebih maju. Daerah yang sudah maju, perekonomiannya lebih didominasi oleh komponen non konsumsi, yaitu investasi.

Pada tahun 2013, konsumsi rumah tangga menyumbang sebesar 68,71 persen terhadap total PDRB Provinsi Maluku Utara, mengalami peningkatan dari dua tahun sebelumnya. Sementara komponen pembangunan fisik yang tercermin dari pembentukan modal tetap bruto (PMTB) hanya mendapat porsi kurang lebih sepersepuluh total PDRB Maluku Utara. Namun dari tahun 2011 ke tahun 2013 mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan. Struktur PDRB menurut pengeluaran Provinsi Maluku Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Struktur PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara
Tahun 2011-2013
(persen)

Komponen	2011	2012 *)	2013 **)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
Konsumsi Rumah Tangga	68,56	68,96	68,71
Konsumsi Pemerintah	31,83	31,07	31,43
PMTB	9,82	10,08	10,20
Perubahan Stok	-12,85	-10,60	-9,11
Ekspor	26,95	25,33	24,54
Impor	24,31	24,83	25,78
PDRB	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

3.4. PDRB Per Kapita

Salah satu turunan dari angka PDRB adalah PDRB per kapita. PDRB per kapita juga dapat dilihat dari dua segi yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang dihasilkan oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menggambarkan besarnya nilai tambah domestik bruto per penduduk secara nominal. Sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan adalah untuk mengetahui nilai tambah nyata serta pertumbuhan nyata per kapita. Dengan demikian PDRB per kapita memberikan gambaran mengenai pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai balas jasa atau kewirausahaan dalam kegiatan ekonomi.

Tabel 3.4
Perbandingan PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK Provinsi Maluku Utara, 2011-2013 (juta rupiah)

PDRB Per Kapita	2011	2012 *)	2013 **)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
Atas Dasar Harga Berlaku	5,66	6,34	6,93
Atas Dasar Harga Konstan 2000	3,03	3,16	3,28

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Selama kurun waktu 2011-2013, PDRB per kapita Provinsi Maluku Utara selalu mengalami peningkatan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada tahun 2013, PDRB per kapita Provinsi Maluku Utara atas

dasar harga berlaku sebesar 6,97 juta rupiah naik dari tahun 2011 dan 2012 masing-masing sebesar 5,66 juta rupiah dan 6,34 juta rupiah. Begitu juga dengan PDRB per kapita atas dasar harga konstan mengalami peningkatan pada tahun 2013 menjadi 3,28 juta rupiah.

<http://malut.bps.go.id>

Bab 4

KOMPONEN PDRB PENGUNAAN

<http://malut.bps.go.id>

Secara umum kondisi perekonomian Provinsi Maluku Utara pada tahun 2013 terlihat cukup stabil. Hal ini didukung oleh data statistik seperti laju inflasi pada harga konsumen yang mencapai 9,78 persen, dengan tingkat pengangguran 3,86 persen. Selain itu, PDRB juga dapat dijadikan sebagai ukuran untuk melihat kondisi perekonomian Provinsi Maluku Utara. Salah satu pendekatan penghitungan PDRB adalah melalui sisi pengeluaran. Komponen penggunaan ini terdiri dari konsumsi rumah tangga, konsumsi LNPRT, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, perubahan stok, ekspor, dan impor.

Melalui PDRB menurut pengeluaran dapat diketahui alokasi penggunaan pendapatan suatu wilayah, terutama untuk konsumsi dan investasi. Selain itu juga dapat dilihat seberapa besar ketergantungan ekonomi suatu daerah terhadap daerah lain dalam bentuk transaksi perdagangan barang dan jasa dengan melihat nilai ekspor dan impor.

4.1 Konsumsi Rumah Tangga

Konsumsi rumah tangga merupakan upaya pemenuhan semua kebutuhan sehari-hari semua anggota rumah tangga baik kebutuhan makanan dan non makanan. Untuk memenuhi kebutuhan ini melalui penghasilan yang diterima oleh penduduk. Komponen konsumsi rumah tangga termasuk juga kedalamnya adalah komponen konsumsi lembaga swasta nirlaba. Konsumsi rumah tangga berfungsi sebagai pelaku konsumsi akhir, demikian juga lembaga pemerintah, merupakan pengguna barang dan jasa sebagai konsumsi akhir, baik yang berasal dari output domestik maupun impor.

Tabel 4.1
Perkembangan Konsumsi Rumah Tangga Menurut Komponen
Pembentuknya Tahun 2011-2013 (miliar rupiah)

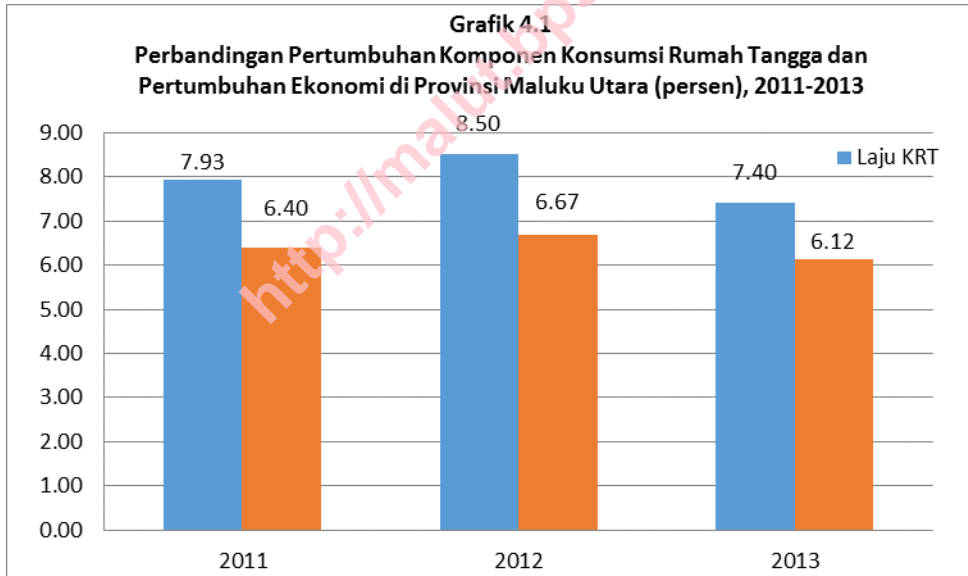
Uraian	2011	2012 *)	2013 **)
(1)	(2)	(3)	(4)
ADHB			
Konsumsi Rumah Tangga	4.140,04	4.770,70	5.308,51
Makanan	2.525,54	2.911,02	3.232,83
Non Makanan	1.569,97	1.810,23	2.018,63
Konsumsi Nirlaba	44,52	49,45	57,05
Total PDRB Maluku Utara	6.038,66	6.918,43	7.725,42
ADHK 2000			
Konsumsi Rumah Tangga	2.639,50	2.863,97	3.075,83
Makanan	1.605,09	1.736,36	1.863,45
Non Makanan	1.006,47	1.098,23	1.180,51
Konsumsi Nirlaba	27,94	29,39	31,87
Total PDRB Maluku Utara	3.230,05	3.445,50	3.656,30

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Secara umum, PDRB Provinsi Maluku Utara bersumber dari konsumsi rumah tangga namun *share*-nya dalam tatanan perekonomian Provinsi Maluku Utara selalu berfluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013, tatanan ekonomi Provinsi Maluku Utara bersumber dari konsumsi rumah tangga sekitar 5.308,51 miliar rupiah atau sekitar 68,71 persen. Sedangkan atas dasar harga konstan 2000,

konsumsi rumah tangga memiliki *share* hingga 84,12 persen dengan capaian 3.075,83 miliar rupiah.

Besarnya peranan konsumsi rumah tangga dalam mendorong perekonomian Provinsi Maluku Utara perlu mendapat perhatian dari pemerintah setempat. Kestabilan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan sehari-hari perlu diatur regulasinya agar tidak terjadi kekurangan ketersediaan bahan kebutuhan. Selain itu tingkat pendapatan masyarakat harus tetap ditingkatkan misalnya dengan menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan upah minimum regional.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Meskipun selalu berfluktuasi dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, konsumsi rumah tangga masih tumbuh kuat dan turut berperan dalam mendukung capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara. Konsumsi rumah tangga

pada tahun 2013 mengalami pertumbuhan sebesar 7,40 persen lebih rendah jika dibanding tahun 2012 yang sebesar 8,50 persen. Capaian pertumbuhan konsumsi rumah tangga ini diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara yang mencapai 6,67 persen pada tahun 2012 dan 6,12 persen di tahun 2013. Pada tahun 2013 laju inflasi cukup tinggi, namun perekonomian Provinsi Maluku Utara masih mengalami peningkatan meskipun melambat. Hal ini dikarenakan konsumen Provinsi Maluku Utara menganggap bahwa inflasi yang tinggi selama triwulan III-2013 sebesar 7,82 persen tidak terlalu berpengaruh terhadap konsumsi mereka karena diikuti oleh kenaikan tingkat pendapatan. Peningkatan konsumsi ini dapat terlihat dari nilai ITK Maluku Utara triwulan III-2013 sebesar 113,23 atau lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya, menunjukkan bahwa kondisi ekonomi dan tingkat optimisme konsumen selama triwulan III-2013 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya.

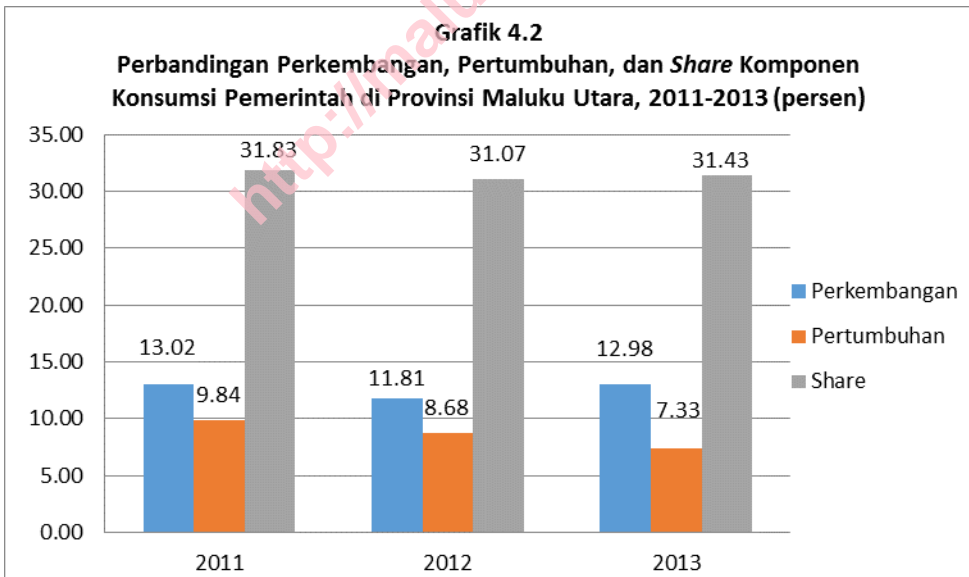
4.2 Konsumsi Pemerintah

Salah satu bentuk konsumsi akhir barang dan jasa adalah komponen konsumsi pemerintah. Konsumsi pemerintah yang dimaksud disini adalah konsumsi pemerintah yang murni untuk konsumsi akhir jadi, dimana tidak termasuk didalamnya adalah konsumsi antara. Konsumsi pemerintah memiliki peran yang relatif penting dalam dalam mendukung proses ekonomi. Meskipun konsumsi pemerintah memiliki peran dalam proses ekonomi, namun diharapkan agar pemerintah tetap memperhatikan aspek kesejahteraan masyarakat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk menjalankan pemerintahan yang sesuai dengan visi dan misi pemerintah setempat diperlukan alokasi anggaran/dana yang tidak sedikit. Biaya yang dikeluarkan ini terdiri dari biaya untuk pembelian barang dan jasa, pembayaran balas jasa pegawai dan penyusutan barang modal.

Akan tetapi penjumlahan dari semua belanja ini masih harus dikurangkan dengan hasil penjualan barang dan jasa pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pemerintah.

Perkembangan konsumsi pemerintah atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan pada tahun 2013 yang mencapai 12,98 persen dibandingkan tahun 2011 dan lebih lambat dari tahun 2010 dengan perkembangan masing-masing sebesar 11,81 persen dan 13,02 persen. Sedangkan atas dasar harga konstan, konsumsi pemerintah tahun 2012 mengalami pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2011 dan tahun 2012. Pada tahun 2013, pertumbuhan konsumsi pemerintah mencapai 7,33 persen lebih lambat dari pertumbuhan tahun 2012 yang tumbuh sebesar 8,68 persen.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Setiap pengeluaran pemerintah daerah diharapkan untuk memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat luas atau publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Akan tetapi pembahasan ini masih belum menekankan pada manfaat yang diterima oleh tiap penduduk dalam artian umum. Hal ini disebabkan karena belum terpisahkan antara pengeluaran pemerintah yang dinikmati secara perorangan (individu) dan maupun secara bersama-sama (kolektif).

Tabel 4.2
Perkembangan Konsumsi Pemerintah Per Kapita di Provinsi Maluku Utara, 2011-2013

Uraian	2011	2012 *)	2013 **)
(1)	(2)	(3)	(4)
ADHB			
Konsumsi Pemerintah (Miliar Rupiah)	1.922,29	2.149,27	2.428,33
Konsumsi Pemerintah Per Kapita (Juta Rupiah)	1,80	1,97	2,18
ADHK 2000			
Konsumsi Pemerintah (Miliar Rupiah)	950,83	1.033,38	1.109,10
Konsumsi Pemerintah Per Kapita (Rupiah)	0,89	0,95	0,99

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Pada tahun 2011, rata-rata konsumsi pemerintah per kapita sebesar 1,80 juta rupiah, naik menjadi 1,97 juta rupiah pada tahun 2012. Kemudian kondisi terakhir di 2013 sudah mencapai 2,18 juta rupiah.

4.3 Pembentukan Modal Tetap Bruto atau Investasi Fisik

Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) merupakan penjumlahan PMTB dan perubahan inventori, apabila perubahan inventori bertanda positif maka PMTB akan menjadi lebih besar. Sedangkan sebaliknya jika perubahan inventori bertanda negatif maka PMB akan menjadi lebih kecil dari PMTB. Apabila nilai PMB lebih besar dari PMTB kondisi ini menunjukkan terjadinya arus atau penambahan atas investasi fisik. Sebaliknya jika PMB lebih kecil dari PMTB maka terjadi pelepasan atau pengurangan inventori.

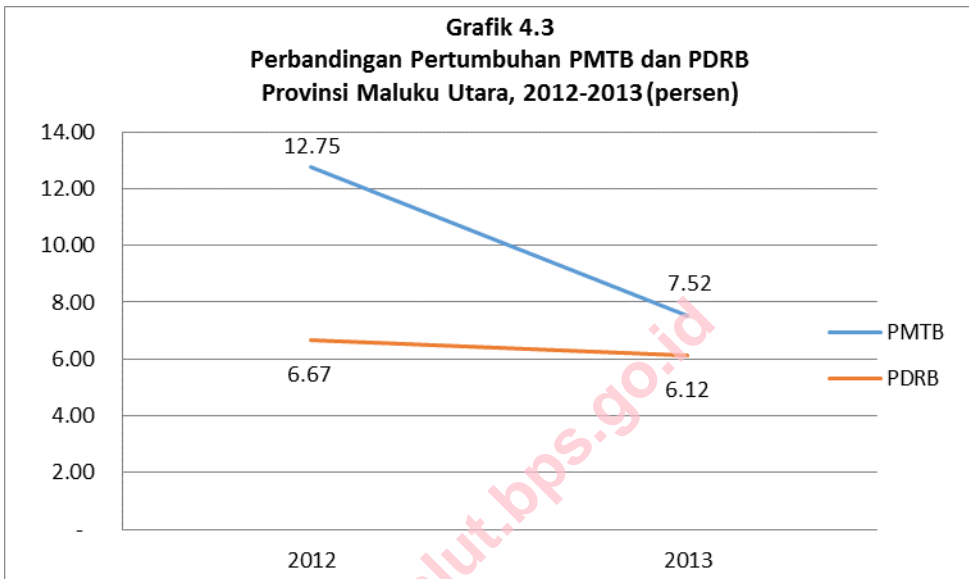
Pada kurun waktu 2011-2012 terlihat bahwa nilai PMB masih di bawah PMTB. PMB tahun 2013 sebesar 84,23 miliar rupiah sementara PMTB Maluku Utara mencapai 788 miliar rupiah. Hal ini disebabkan karena perubahan inventori bernilai minus hingga 703,78 miliar rupiah.

Tabel 4.3
Perkembangan Pembentukan Modal Bruto (PMB) Menurut Komponen di
Provinsi Maluku Utara, 2011-2013
(miliar rupiah)

Uraian	2011	2012 *)	2013 **)
(1)	(2)	(3)	(4)
ADHB			
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	592,83	697,33	788,00
Inventori & Diskrepani Statistik	-776,21	-733,50	-703,78
Pembentukan Modal Bruto (PMB)	-183,38	-36,17	84,23
ADHK 2000			
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	248,17	279,81	300,84
Inventori & Diskrepani Statistik	-660,48	-733,28	-780,17
Pembentukan Modal Bruto (PMB)	-412,31	-453,47	-479,32

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Pertumbuhan komponen PMTB juga mengalami pergerakan yang berfluktuatif, namun selalu di atas pertumbuhan PDRB Provinsi Maluku Utara. Pertumbuhan komponen PMTB yang lebih cepat dibanding total PDRB memperlihatkan bahwa pembangunan fisik di Provinsi Maluku Utara mengalami kemajuan yang cukup pesat. Peningkatan ini diharapkan terus berlanjut mengingat Provinsi Maluku Utara masih membutuhkan berbagai sarana fisik yang memadai guna meningkatkan kesejahteraan penduduk.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

4.4 Ekspor dan Impor Barang dan Jasa

Kegiatan ekspor impor memiliki peran penting dalam sistem perekonomian suatu wilayah. Transaksi kegiatan ini menggambarkan besarnya nilai barang dan jasa yang dilakukan oleh pelaku ekonomi domestik saat bertransaksi dengan pelaku ekonomi wilayah lain.

Ekspor merupakan kegiatan ekonomi yang mengakibatkan arus barang dan jasa keluar dari suatu wilayah. Sedangkan impor adalah sebaliknya, yaitu kegiatan ekonomi yang mengakibatkan arus barang dan jasa masuk ke suatu wilayah.

Tabel 4.4
Keseimbangan Neraca Perdagangan Luar Wilayah Provinsi Maluku Utara,
2011-2013 (miliar rupiah)

Keterangan	2011	2012 *)	2013 **)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
Ekspor	1.627,66	1.752,67	1.895,62
Impor	1.467,94	1.718,03	1.991,27
Ekspor Neto (X-M)	159,72	34,64	-95,66

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Kondisi neraca perdagangan Provinsi Maluku Utara dalam tiga tahun terakhir ini mengalami perkembangan yang kurang baik. Hal ini ditandai dengan arus masuk barang dan jasa ke provinsi ini yang makin lama makin besar daripada arus keluar barang dan jasa ke daerah lain. Jika dicermati perkembangannya dari tahun ke tahun, terlihat mengalami penurunan pada tahun 2013 yaitu mencapai minus 95,66 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2011 dan 2012 yang mencapai 159,72 miliar rupiah dan 34,64 miliar rupiah.

4.4.1 Ekspor

Dengan melihat data ekspor, kita dapat mengetahui seberapa besar porsi produk domestik yang dimanfaatkan atau dijual ke wilayah lain, baik untuk tujuan konsumsi ataupun lainnya. Bagi suatu wilayah, transaksi ekspor akan berdampak terhadap penambahan pendapatan bagi wilayah tersebut. Kegiatan ekspor ini dapat berlangsung setidaknya disebabkan karena 2 (dua) faktor, pertama, permintaan oleh

pasar luar wilayah (*demand push*) dan kedua, karena adanya kelebihan di pasar domestik (*over supply*).

Tabel 4.4.1
Perkembangan Ekspor Provinsi Maluku Utara, 2011-2013

Keterangan	2011	2012 *)	2013 **)
(1)	(2)	(3)	(4)
ADHB			
Ekspor (Miliar Rupiah)	1.627,66	1.752,67	1.895,61
Total PDRB (Miliar Rupiah)	6.038,66	6.918,43	7.725,42
Share Ekspor Terhadap PDRB	26,95	25,33	24,54
Perkembangan Ekspor	4,36	7,68	8,16
ADHK 2000			
Ekspor (Miliar Rupiah)	867,16	892,31	920,60
Total PDRB (Miliar Rupiah)	3.656,05	3.445,50	3.656,30
Pertumbuhan Ekspor	1,52	2,90	3,17

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Secara umum, proporsi ekspor terhadap total PDRB dalam tiga tahun terakhir ini menunjukkan penurunan. Pada tahun 2013, proporsi ekspor terhadap total PDRB sebesar 24,54 persen dengan nilai ekspor sebesar 1.895,62 miliar

rupiah, meningkat dari tahun 2011 dan 2012 yang mencapai 1.627,66 miliar rupiah dan 1.752,67 miliar rupiah.

Seiring dengan perkembangan nilai ekspor, berdampak terhadap pertumbuhan ekspor dalam kurun waktu 2011-2013. Pada 2013, ekspor tumbuh lebih cepat sebesar 3,17 persen dibandingkan dengan tahun 2012 yang mencapai pertumbuhan sebesar 2,90 persen. Meningkatnya kinerja ekspor Provinsi Maluku Utara secara umum, mengindikasikan bahwa output produksi di Provinsi Maluku Utara ternyata diminati oleh pihak luar. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus menangkap peluang yang cukup menjanjikan ini guna meningkatkan kesejahteraan penduduk Provinsi Maluku Utara. Komoditi yang diekspor dari Provinsi Maluku Utara ke luar daerah antara lain yaitu bijih nikel, kopra, hasil perikanan, dan lainnya.

4.4.2 Impor

Kebalikan dari ekspor, transaksi impor menggambarkan besarnya produk daerah lain yang masuk di suatu wilayah domestik. Ekspor akan menambah cadangan moneter, sementara impor akan mengurangi cadangan moneter wilayah domestik. Namun demikian kontribusi impor barang dan jasa Provinsi Maluku Utara cukup tinggi, hal ini disebabkan oleh ketergantungan masyarakat Provinsi Maluku utara untuk barang-barang industri dan beberapa komoditas pertanian yang sebagian besar belum dihasilkan di Provinsi Maluku Utara.

Selama tiga tahun terakhir, *trend* proporsi impor terhadap total PDRB mengalami pergerakan yang berfluktuatif. Pada tahun 2013, komponen impor berkontribusi sebesar 25,78 persen dalam PDRB (nilai impor sebesar 1.991,27 miliar rupiah) dengan perkembangan sebesar 15,90 persen dari tahun 2012. Kondisi ini mengalami peningkatan dari tahun 2011 dan tahun 2012 dengan

kontribusi terhadap total PDRB masing-masing sebesar 24,31 persen dan 24,83 persen.

Pertumbuhan impor juga mengalami pergerakan yang berfluktuatif selama tiga tahun terakhir ini. Pada tahun 2013, pertumbuhan impor sebesar 8,89 persen meningkat dibanding tahun 2011 dan melambat dibanding tahun 2012 dengan pertumbuhan masing-masing mencapai 6,72 persen dan 9,27 persen.

Tabel 4.4.2
Perkembangan Impor Provinsi Maluku Utara, 2011-2013

Keterangan	2011	2012 *)	2013 **)
(1)	(2)	(3)	(4)
ADHB			
Impor (Miliar Rupiah)	1.467,94	1.718,03	1.991,27
Total PDRB (Miliar Rupiah)	6.038,66	6.918,43	7.725,42
Share Impor Terhadap PDRB	24,31	24,83	25,78
Perkembangan Impor	8,36	17,04	15,90
ADHK 2000			
Impor (Miliar Rupiah)	815,13	890,69	969,91
Total PDRB (Miliar Rupiah)	3.656,05	3.445,50	3.656,30
Pertumbuhan Impor	6,72	9,27	8,89

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

<http://malut.bps.go.id>

LAMPIRAN

Lampiran 1.
PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Maluku
Utara Tahun 2011-2013
(miliar rupiah)

Komponen	2011	2012 *)	2013 **)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4 095,52	4 721,24	5 251,46
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	44,52	49,45	57,05
3. Konsumsi Pemerintah	1 922,29	2 149,27	2 428,33
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	592,83	697,33	788,00
5. Perubahan Stok dan Diskrepansi Statistik	(776,21)	(733,50)	(703,78)
6. Ekspor Barang dan Jasa	1 627,66	1 752,67	1 895,61
7. Impor Barang dan Jasa	1 467,94	1 718,03	1 991,27
PDRB	6 038,66	6 918,43	7 725,42

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Lampiran 2.
PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2000
Provinsi Maluku Utara Tahun 2011-2013
(miliar rupiah)

Komponen	2011	2012 *)	2013 **)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Konsumsi Rumah Tangga	2 611,56	2 834,59	3 043,96
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	27,94	29,39	31,87
3. Konsumsi Pemerintah	950,83	1 033,38	1 109,10
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	248,17	279,81	300,84
5. Perubahan Stok dan Diskrepansi Statistik	(660,48)	(733,28)	(780,17)
6. Ekspor Barang dan Jasa	867,16	892,31	920,60
7. Impor Barang dan Jasa	815,13	890,69	969,91
PDRB	3 230,05	3 445,50	3 656,30

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Lampiran 3.
Distribusi Persentase PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku
Provinsi Maluku Utara Tahun 2011-2013
(persen)

Komponen	2011	2012 *)	2013 **)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Konsumsi Rumah Tangga	67,82	68,24	67,98
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	0,74	0,71	0,74
3. Konsumsi Pemerintah	31,83	31,07	31,43
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	9,82	10,08	10,20
5. Perubahan Stok dan Diskrepansi Statistik	(12,85)	(10,60)	(9,11)
6. Ekspor Barang dan Jasa	26,95	25,33	24,54
7. Impor Barang dan Jasa	24,31	24,83	25,78
PDRB	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Lampiran 4.
Distribusi Persentase PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga
Konstan 2000 Provinsi Maluku Utara Tahun 2011-2013
(persen)

Komponen	2011	2012 *)	2013 **)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Konsumsi Rumah Tangga	80,85	82,27	83,25
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	0,86	0,85	0,87
3. Konsumsi Pemerintah	29,44	29,99	30,33
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	7,68	8,12	8,23
5. Perubahan Stok dan Diskrepansi Statistik	(20,45)	(21,28)	(21,34)
6. Ekspor Barang dan Jasa	26,85	25,90	25,18
7. Impor Barang dan Jasa	25,24	25,85	26,53
PDRB	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Lampiran 5.
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku
Provinsi Maluku Utara Tahun 2011-2013
(persen)

Komponen	2011	2012 *)	2013 **)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Konsumsi Rumah Tangga	12,37	15,28	11,23
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	10,54	11,08	15,37
3. Konsumsi Pemerintah	13,02	11,81	12,98
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	16,92	17,63	13,00
5. Perubahan Stok dan Diskrepani Statistik	9,64	(5,50)	(4,05)
6. Ekspor Barang dan Jasa	4,36	7,68	8,16
7. Impor Barang dan Jasa	8,36	17,04	15,90
PDRB	12,04	14,57	11,66

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Lampiran 6.
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran
Atas Dasar Harga Konstan 2000 Provinsi Maluku Utara Tahun 2011-2013
(persen)

Komponen	2011	2012 *)	2013 **)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Konsumsi Rumah Tangga	7,96	8,54	7,39
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	5,79	5,18	8,46
3. Konsumsi Pemerintah	9,84	8,68	7,33
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	12,24	12,75	7,52
5. Perubahan Stok & Diskrepansi Statistik	12,51	11,02	6,39
6. Ekspor Barang dan Jasa	1,52	2,90	3,17
7. Impor Barang dan Jasa	6,72	9,27	8,89
PDRB	6,40	6,67	6,12

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Lampiran 7.
Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara
Tahun 2011-2013
(persen)

Komponen	2011	2012 *)	2013 **)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Konsumsi Rumah Tangga	156,82	166,56	172,52
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	159,35	168,28	179,01
3. Konsumsi Pemerintah	202,17	207,98	218,95
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	238,88	249,21	261,93
5. Perubahan Stok dan Diskrepansi Statistik	117,52	100,03	90,21
6. Ekspor Barang dan Jasa	187,70	196,42	205,91
7. Impor Barang dan Jasa	180,09	192,89	205,31
PDRB	186,95	200,80	211,29

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Lampiran 8.
Indeks Berantai PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku
Provinsi Maluku Utara Tahun 2011-2013
(persen)

Komponen	2011	2012 *)	2013 **)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Konsumsi Rumah Tangga	112,37	115,28	111,23
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	110,54	111,08	115,37
3. Konsumsi Pemerintah	113,02	111,81	112,98
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	116,92	117,63	113,00
5. Perubahan Stok dan Diskrepani Statistik	109,64	94,50	95,95
6. Ekspor Barang dan Jasa	104,36	107,68	108,16
7. Impor Barang dan Jasa	108,36	117,04	115,90
PDRB	112,04	114,57	111,66

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Lampiran 9.
Indeks Berantai PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan
2000 Provinsi Maluku Utara Tahun 2011-2013
(persen)

Komponen	2011	2012 *)	2013 **)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Konsumsi Rumah Tangga	107,96	108,54	107,39
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	105,79	105,18	108,46
3. Konsumsi Pemerintah	109,84	108,68	107,33
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	112,24	112,75	107,52
5. Perubahan Stok dan Diskrepansi Statistik	112,51	111,02	106,39
6. Ekspor Barang dan Jasa	101,52	102,90	103,17
7. Impor Barang dan Jasa	106,72	109,27	108,89
PDRB	106,40	106,67	106,12

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

<http://malut.bps.go.id>

D A T A
MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI MALUKU UTARA**
Jalan Stadion No. 65 Ternate, Telp. (0921) 3127878 Fax. (0921) 3126301
Homepage : <http://malut.bps.go.id> Email : bps8200@bps.go.id